

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK TAHUN 2019**Luthfi Faisal Natsir****FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu****e-mail : luthfi.lfn@unwir.ac.id****ABSTRAK**

Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah landasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan dirancang oleh pemerintah guna terciptanya kesejahteraan sosial. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Depok harus sesuai dengan perencanaan pembangunan yang ada pada tingkatan pemerintah yang lebih tinggi guna untuk mensingergikan atau menyelaraskan perencanaan pembangunan yang berfungsi untuk lebih menguatkan keterkaitan antar tingkatan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Kata Kunci: Kebijakan, Perencanaan, pembangunan, Kota Depok

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dilakukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan juga langkah-langkah yang akan ditempuh guna menciptakan kesejahteraan sosial, yang dirancang oleh pemerintah dan seluruh tingkatannya dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (stakeholders). Mengingat rancangan tersebut dimaksud untuk mensinergikan/mensinkronisasikan perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh tingkatan yang lebih tinggi untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan berfungsi untuk lebih menguatkan keterkaitan antar tingkatan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Pencapaian pembangunan tingkat provinsi (Jawa Barat) merupakan hasil agregat pencapaian pembangunan yang ada di daerah (kabupaten/kota). Dalam hal ini secara implisit mengedepankan pentingnya pembangunan berdasarkan kebutuhan, pemerataan pembangunan, sinkronisasi dan sinergi serta penguatan koordinasi dalam proses pembangunan, termasuk pada tahap perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota perlu senantiasa memperkuat koordinasi guna menciptakan sinergitas dan sinkronisasi yang terhubung langsung dengan perencanaan yang ada dari provinsi.

Salah satu sasaran pembangunan Kota Depok dalam mewujudkan Visi Kota Depok "Unggul, Nyaman dan Religius" dengan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing guna membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan serta meningkatkan kesempatan bekerja dan perlindungan tenaga kerja yang memberikan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut diatas bersinergi dengan salah satu program prioritas pembangunan Jawa Barat yaitu mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial.

Sebagai bentuk penjabaran dari visi Pemerintah Kota Depok diatas maka disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2016-2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Adapun visi dan misi Tahun 2016-2021 dari Kota Depok beserta sarasannya dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1 Visi, Misi, dan Sasaran Kota Depok Tahun 2016-2021

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Religius dan Nyaman		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi I (Pertama) : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik
Misi II (Kedua): Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial 4. Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat
Misi III (Ketiga) : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas. 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan
Misi IV (Keempat): Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 2. Mewujudkan kota yang nyaman dan ramah keluarga 	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Transportasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman
Misi V (Kelima): Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta	Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai - nilai agama dan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kohesi Sosial 2. Meningkatnya Toleransi Dalam Kehidupan Beragama

meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara		

Berdasarkan uraian diatas maka upaya yang dilakukan oleh Kota Depok dalam mendukung perencanaan pembangunan yaitu dengan cara mensinergikan rencana pembangunan yang ada dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, melalui penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019 yang Bersinergi Dengan Provinsi Jawa Barat

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Dalam kegiatan ini tidak banyak menghabiskan waktu lama, dikarenakan dilakukan interview secara berkelompok bukan secara individu. Dengan melakukan interview secara berkelompok maka pengumpulan data tersebut akan lebih mudah dan cepat dilakukan (OECD, n.d). Kelompok tersebut terdiri pihak-pihak kunci yang mengetahui dan memanfaatkan suatu program atau kegiatan.



Gambar 1 Kegiatan *Focus Group Discussion* Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019

Dalam penyusunan dokumen kebijakan perencanaan pembangunan Kota Depok yang bersinergi dengan Provinsi Jawa Barat melalui pengumpulan data-data dari tahap *ex-ante*. Dengan demikian, dibutuhkan tujuan dan cakupan program atau kegiatan yang jelas. Pengumpulan data dapat berasal dari seluruh *stakeholder* dan pemanfaat yang dipengaruhi oleh program ataupun kegiatan yang dilakukan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*) (Dunn, 2005: 26).

Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn pun menjelaskan bahwa Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru” (Dunn, 2005: 26). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda.

Dari uraian diatas, kami mencoba memformulasikan rencana program kebijakan pembangunan Kota Depok Tahun 2019 melalui indikator capaian yaitu:

- a. Index Pembangunan Manusia (IPM);
- b. Tingkat Kemiskinan;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- d. Index Gini;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
- f. Laju Pertumbuhan Investasi;
- g. Ketaatan terhadap RTRW;
- h. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB;
- i. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik;
- j. Index Kepuasan Masyarakat;
- k. Inflasi;
- l. Jumlah Penduduk.

a. Index Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat.

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia Dilihat Dari (Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah)

Tahun	AHH	HLS	RLS	Pengeluaran/kapita	IPM
2013	78.27	13.24	10.43	14160,63	78.27
2014	78.58	13.3	10.58	14238.65	78.59
2015	79.11	13.54	10.71	14424.49	79.11
2016	79.6	13.86	10.76	14560	79.60
2017	79.83	14.08	10.92	14727	79.83

Sumber : BPS Nasional, 2018

Nilai IPM ini diukur melalui 3 indikator yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori penduduk miskin terhadap jumlah penduduk.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Depok tahun 2017 sebesar 2,34% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (10,12%) maupun Provinsi Jawa Barat (7,83%). Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2017 sebesar 97,66%.

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori penduduk miskin terhadap jumlah penduduk.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Depok tahun 2017 sebesar 2,34% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (10,12%) maupun Provinsi Jawa Barat (7,83%). Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2017 sebesar 97,66%.

Tabel 3 Tingkat Kemiskinan Kota Depok

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Index Kedalaman Kemiskinan	Index Keparahan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)
2013	45.912	0.26	0.06	2.32	443.302
2014	44.483	0.4	0.09	2.18	462.069
2015	50.546	0.23	0.06	2.40	496.747
2016	50.561	0.30	0.06	2.34	552.934
2017	52.756	0.25	0.06	2.34	556.470

Sumber : BPS Nasional, 2018

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja Tingkat kesempatan kerja Kota Depok dari tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan trend peningkatan. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka dalam rentang waktu yang sama memperlihatkan trend penurunan.

Kondisi sosial ekonomi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha padat karya seperti pada Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberi kontribusi besar pada peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Depok tahun 2015 serta adanya migrasi penduduk berpendidikan tinggi ke Kota Depok.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok pada Tahun 2015 sebesar 7,48 persen menurun dibandingkan tingkat pengangguran pada tahun 2014 sebesar 8,44 persen. Penurunan pengangguran di Kota Depok sebesar 0,96 persen di dominasi oleh tamatan SLTA yaitu sebesar 63,70 persen. Diikuti oleh lulusan Diploma I/II/III/Akademi/Universitas sebesar 18,99 persen dan lulusan SLTP sebesar 11,72 persen serta lulusan SD sebesar 5,59 persen.

Hal ini bias jadi disebabkan karena penduduk yang baru lulus/tamat SLTA belum terserap ke pasar kerja atau dalam proses mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Meskipun tingkat pengangguran mengalami penurunan, Pemerintah Kota Depok terus berupaya lebih serius untuk menangani masalah pengangguran diantaranya pengembangan wirausaha muda atau pemula dengan memberikan pelatihan, disamping memperluas lapangan usaha di sektor informal maupun formal.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Depok

Indikator/Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
TPAK (%)	62.74	63.34	61.62	NA	NA
TKK (%)	92.33	91.56	92.52	NA	NA
TPT (%)	7.67	8.44	7.48	NA	NA

d. Index Gini

Gini rasio Kota Depok sepanjang tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, bahkan pada tahun 2015 naiknya dari 0,3652 menjadi 0,4025. Peningkatan tersebut menggambarkan semakin melebarnya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Hal ini perlu direspon dengan tepat agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Depok dapat terjaga, upaya pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan kemudahan Investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan angka kesenjangan dapat dirasakan, hal ini terlihat dari turunnya angka gini rasio tahun 2017 menjadi 0,3539 lebih rendah di bandingkan tahun 2015.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi

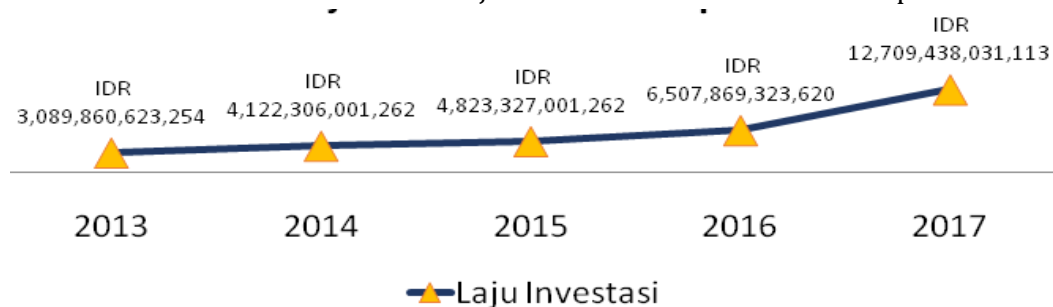
Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2016, berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2017 adalah sebesar 7,28 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebesar 0,64 persen. Peningkatan realisasi pertumbuhan ekonomi ini antara lain dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh di tahun 2016 ditengarai memberi dampak pada kinerja yang positif bagi perekonomian Indonesia, termasuk Kota Depok. Inflasi PDRB Kota Depok Tahun 2016 sebesar 2,45 persen yang disebabkan oleh Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kebijakan nasional tentang kenaikan harga BBM listrik dan gas mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok yang ikut melambung sehingga mengganggu pertumbuhan industri olahan dan kenaikan tarif angkutan kota serta sektor distribusi dan logistik.

f. Laju Pertumbuhan Investasi

Iklim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya kepastian regulasi, jumlah penduduk kota yang cukup banyak, kondisi demografi kependudukan yang didominasi oleh usia muda, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Grafik 1 Laju Perumbuhan Investasi Kota Depok



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok, 2018

g. Ketaatan terhadap RTRW

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

h. Rasio RTH Per Satuan Luas wilayah ber HPL/HGL

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*openspaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*publicspaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR no.24/1992).

Pengertian ruang publik (*public spaces*) adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Ciri-ciri utama dari *public spaces* adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya berupa malls, plazas dan taman bermain.

Jadi ruang terbuka hijau (RTH) lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan *public spaces* dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. *Public spaces* adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan RTH dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. fungsi dari RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

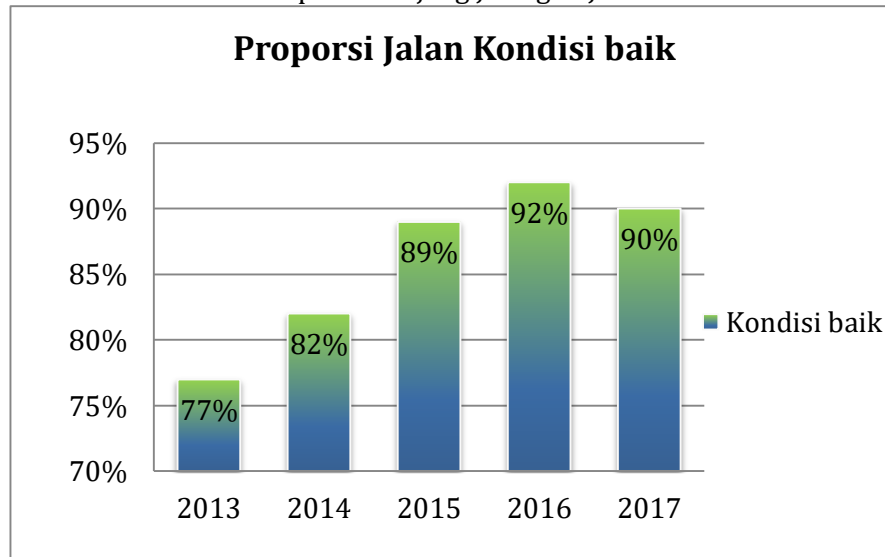
i. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Analisis kinerja atas fasilitas dan infrastruktur wilayah dilakukan terhadap kondisi prasarana dan sarana transportasi, titik kemacetan, titik banjir, dan layanan persampahan. Jika dirinci secara umum, kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik dengan perkerasan beton, hotmix, ataupun paving block pada tahun 2016 adalah sepanjang 1438,42 km yang terdiri dari

469,63 km jalan sektoral/local dan 968,79 km jalan lingkungan atau sekitar 92% dari total panjang jaringan jalan Kota Depok sepanjang 1562.31 km.

Pada tahun 2017 total panjang jaringan jalan Kota Depok berkurang menjadi 1283 km yang terdiri dari 547,63 km jalan sektoral/local dan 735,37 km jalan lingkungan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan status jalan di sejumlah ruas jalan. Sehingga persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ikut berkurang menjadi sekitar 90% yang terdiri dari 490,367 km jalan sektoral/lokal dan 663,26 jalan lingkungan.

Tabel 5 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik



Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Kota Depok

Pertumbuhan penduduk di Kota Depok berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan munculnya titik-titik kemacetan. Survei titik kemacetan tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 20 titik kemacetan di Kota Depok. Faktor penyebab kemacetan tersebut beragam, baik akibat terbatasnya kapasitas jalan, kerusakan badan jalan, desain persimpangan yang tidak ideal, percampuran moda lokal dan regional, hambatan samping akibat naik-turun penumpang maupun keberadaan PKL, perlintasan kereta api, serta keberadaan angkutan informal (ojek) yang makin meningkatkan beban jalan.

j. Index Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

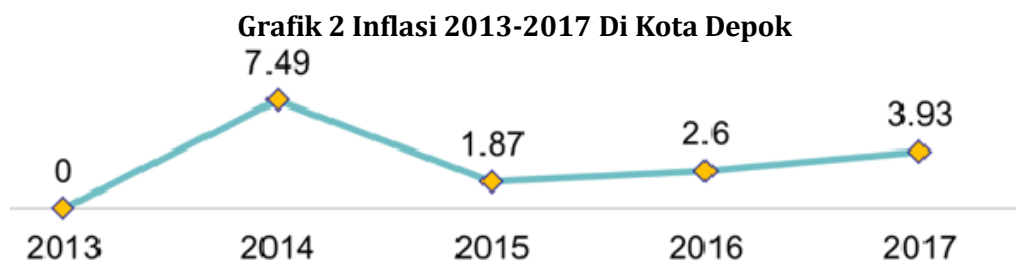
Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Depok pada Tahun 2016 secara keseluruhan yang meliputi 21 jenis pelayanan publik diperoleh hasil IKM sebesar 80,96. Jika diklasifikasikan berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014,

nilai IKM tersebut termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan B (Baik). Sedangkan pada Tahun 2017 capaian IKM ada peningkatan 0,39 yang mencapai nilai sebesar 81,09 dan dalam kategori Mutu Pelayanan B (Baik).

k. Inflasi

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya



Sumber: BPS Kota Depok, 2018

Dinamika inflasi tahunan Kota Depok pada tahun 2014 cukup tinggi yaitu berada pada angka 7.49 kemudian turun sangat signifikan pada tahun 2015 ke angka 1.87. meskipun demikian angka inflasi kembali merangkak naik ke tahun berikutnya sampai tahun 2017. Hal ini disebabkan salah satunya oleh faktor pelemahan nilai tukar nilai mata uang rupiah setiap tahunnya.

l. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, Kota Depok pada Tahun 2017 dihuni oleh 2.254.513 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.135.539 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.118.974 jiwa. Persentase pertumbuhan penduduk Tahun 2017 diperkirakan sebesar 3,43 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan kelahiran di Kota Depok. Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2017 mencapai 11.256 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (16.790 jiwa/km²), Kecamatan Beji (15.061 jiwa/km²) dan Kecamatan Pancoran Mas (15.025 jiwa/km²). Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan relatif rendah adalah Kecamatan Sawangan (6.160 jiwa/km²) dan Kecamatan Bojongsari (6.507 jiwa/km²). Meskipun Kecamatan Cimanggis berpenduduk paling banyak (313.987 jiwa), namun tidak menjadikannya sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat. Hal ini karena wilayah kecamatan Cimanggis relatif lebih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 21,22km².

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan.

Tabel 6 Jumlah Penduduk 2013-2017 Di Kota Depok

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2013	990.289	971.871	1.962.160
2014	1.025.784	1.007.724	2.033.508
2015	1.061.889	1.044.211	2.106.100
2016	1.098.473	1.081.340	2.179.813
2017	1.135.539	1.118.974	2.254.513

Sumber: BPS Kota Depok, 2018

Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok tahun 2017 sebesar 101,48. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Namun dalam rentang umur 13 hingga 18 tahun, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Sementara dalam kelompok umur 60 tahun ke atas, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki.

2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Depok Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2019 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD). Berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2019 sebagaiberikut:

1. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan usaha mikro, produk unggulan lokal dan kepariwisataan, dengan sasaran :
 1. Tersedianya destinasi wisata unggulan
 2. Meningkatnya ekonomi kreatif dan produk unggulan
 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pemberdayaanUsaha Mikro dan Koperasi Sektor riil
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga
 2. Cakupan Universal Coverage 100 %
3. Pemerataan layanan pendidikan dan akses pembiayaan pendidikan, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya akses pembiayaan pendidikan bagi masyarakatmiskin
 2. Meningkatnya pemerataan fasilitas pendidikan di tiap wilayahKota Depok
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
 1. Terintegrasinya data dan informasi
 2. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan.
5. Pengembangan infrastruktur pelayanan dasar yang nyaman denganmemperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya cakupan pengelolaan persampahan
 2. Bertambahnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 3. Menurunnya pencemaran lingkungan
 4. Meningkatnya konservasi sumber daya air
 5. Meningkatnya akses sanitasi
 6. Berkurangnya kawasan kumuh
 7. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
 8. Terpeliharanya PSU perumahan dan permukiman
 9. Bertambahnya ruas jalan
 10. Tertatanya angkutan umum
6. Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan fungsikeluarga, pemuda, masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan, dengansasaran :
1. Menurunnya angka kriminalitas
 2. Meningkatnya peran Organisasi kepemudaan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam menangani permasalahan sosial remaja
 3. Meningkatnya optimalisasi kelembagaan Lansia di Kecamatan dan Kelurahan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis, menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Depok berdasarkan pada analisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat.
2. Prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2019 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), dan Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat (RKPD).

DAFTAR PUSTAKA :

- Badan Pusat Statistik, 2018. Depok Dalam Angka Tahun 2018. Depok: Badan Pusat Statistik.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Alih Bahasa : Mujahir Darwin. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjun Surjaman. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2008, *Public Policy*. Jakarta PT. Elex Media Komputindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
- Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
- Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 54 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

